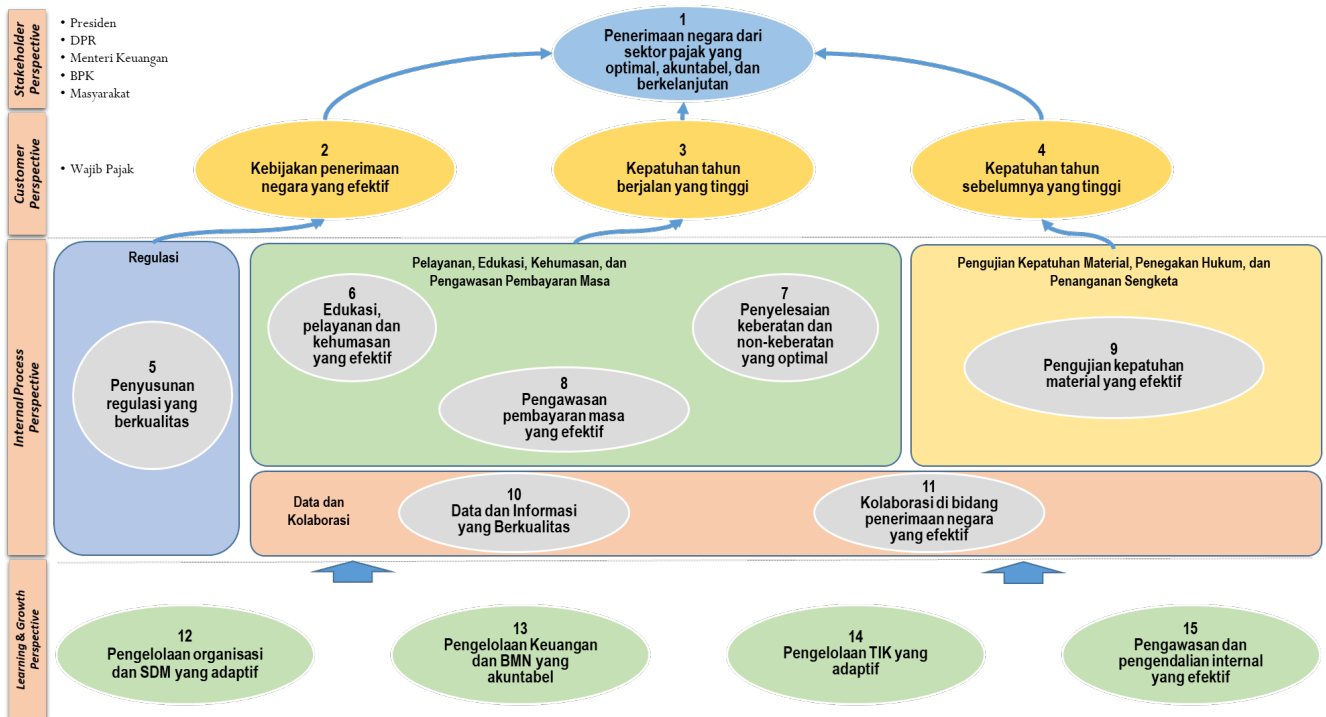




PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-3/MK/2024 DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, akuntabel, dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1c-CP	Indeks integritas organisasi	100
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	3a-CP	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	100%
		3a1-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	100%
		3a2-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	4a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Penyusunan regulasi yang berkualitas	5a-N	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (Skala 10)
		5b-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85%
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	6a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		6b-N	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
7.	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal	7a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86%
		7a1-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%
		7a2-CP	Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	94%
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	8a-N	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	83,75%
		9a1-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		9a2-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%
		9a3-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
		9a4-CP	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	45%
10.	Data dan informasi yang berkualitas	10a-N	Persentase data yang valid	90%
11.	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif	11a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%
12.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		12b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		12c-N	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	94%
13.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100
		13b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
14.	Pengelolaan TIK yang adaptif	14a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
15.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	15a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)
		15b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82



Program / Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. <i>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.588.471.786.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 222.405.404.000
2. Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	Rp 167.933.536.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.061.747.797.000
4. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp 12.177.322.000
5. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 14.755.605.000
6. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 76.882.641.000
7. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp 32.569.481.000
B. <i>Program Kebijakan Fiskal</i>	Rp 188.818.000
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 188.818.000
C. <i>Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.663.479.220.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 1.676.438.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.585.102.480.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.512.213.569.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 3.898.133.000
5. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 560.257.800.000
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 330.800.000
Total	Rp 6.252.139.824.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 30 Januari 2024
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, akuntabel, dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Kebijakan penerimaan negara yang efektif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
3a-CP	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	41,50%	65%	65%	82,50%	82,50%	100%	100%
3a1-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3a2-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
4a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Penyusunan regulasi yang berkualitas							
5a-N	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,60 (skala 10)	7,60 (skala 10)
5b-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
6	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
6a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal							
7a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
7a1-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7a2-CP	Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
8	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
8a-N	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	66,25%	71,25%	71,25%	76,25%	76,25%	83,75%	83,75%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9a1-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a2-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a3-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
9a4-CP	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
10	Data dan informasi yang berkualitas							
10a-N	Persentase data yang valid	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif							
11a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
12	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
12b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12c-N	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
13	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel							
13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
13b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
14	Pengelolaan TIK yang adaptif							
14a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
15a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
15b-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024
Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo



**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) / Core Tax System	1. Penyelesaian System Integration Testing 2. Penyelesaian Non Functional Testing 3. Penyelesaian Training 4. Penyelesaian Data Migration 5. Penyelesaian System Deployment	Q1: 1. System Integration Testing 2. Non Functional Testing a. System Test b. Performance Test c. Security Test d. Availability Test e. Scalability Test Q2: 1. Non Functional Testing (Precommissioning Test) 2. User Acceptance Testing 3. Data Migration 4. Training	Q1: 1. Integration Test Report 2. System Test Report 3. Performance Test Report 4. Security Test Report 5. Availability Test Report 6. Scalability Test Report Q2: 1. Precommissioning Test Report 2. User Acceptance Test Report 3. Data Migration Report 4. Training Technical Staff Completion Report 5. Training Testers and Helpdesk Completion Report	Januari-Desember 2024	Direktorat TIK	311.457.183.000



					6. <i>Training of Trainer Completion Report</i> 7. <i>User and System Admin Training Material</i>			
				Q3: 1. <i>Operational Acceptance Testing</i>	Q3: 1. <i>Operational Acceptance Test Completion Report</i>			
				Q4: 1. <i>Go-live readiness assessment</i> 2. <i>Initial deployment</i>	Q4: 1. <i>Go-live Readiness Assessment</i> 2. <i>Initial Deployment Completion Report</i>			
2	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital	35 Laboratorium Forensik Digital DJP yang menyediakan layanan di bidang Forensik Digital sebagai berikut: 1. Forensik digital terhadap komputer; 2. Forensik digital terhadap telepon seluler;	Q1: 1. Penerbitan KEP Dirjen Pembentukan LFD Kanwil DJP 2. Penerbitan SOP dan Dokumen Pengelolaan LFD Kanwil 3. Asistensi implementasi SOP dan Dokumen Pengelolaan LFD Kanwil	Q1: 1. KEP Pembentukan LFD Kanwil DJP 2. Dokumen panduan mutu LFD Kanwil DJP 3. Dokumen prosedur pengelolaan LFD Kanwil DJP 4. Dokumen prosedur forensik digital LFD Kanwil DJP	Januari-Desember 2024	1. Direktorat Penegakan Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal 3. Kanwil DJP 4. Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti	Rp 10.000.000.000



			<p>3. Forensik digital terhadap akun internet; dan</p> <p>4. Forensik digital terhadap perangkat lainnya.</p>	<p>4. Nota Dinas Penerapan SOP dan Dokumen Pengelolaan LFD Kanwil</p> <p>5. Implementasi SOP dan Dokumen Pengelolaan LFD Kanwil</p> <p>6. Perpanjangan Lisensi Peralatan Forensik LFD KPDJP dan Kanwil</p> <p>7. Koordinasi dengan kanwil DJP Sumut I, Jatim I, dan Sulselbartra terkait proses akreditasi TA 2024</p> <p>8. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait dana Akreditasi dan Pemeliharaan TA 2025</p>	<p>5. Dokumen Instruksi kerja (IK) LFD Kanwil DJP</p> <p>6. Laporan kegiatan Asistensi implementasi SOP dan Dokumen Pengelolaan LFD Kanwil</p> <p>7. Nota Dinas Permintaan Perpanjangan Lisensi Peralatan Forensik LFD KPDJP dan Kanwil</p>			
				<p>Q2:</p> <p>1. Koordinasi dengan Kelompok Kerja</p>	<p>Q2:</p> <p>1. ND Spesifikasi Teknis Pengadaan</p>			



				<p>Pemilihan UKPBJ terkait pengadaan peralatan IT Pendukung Kegiatan Forensik Digital KP DJP dan Kanwil DJP</p> <p>2. Pengiriman ND spesifikasi teknis peralatan IT Pendukung Kegiatan Forensik Digital</p> <p>3. Pengadaan peralatan IT Pendukung Kegiatan Forensik Digital KP DJP dan Kanwil DJP</p>	<p>Laboratorium Forensik Digital ke Kanwil</p> <p>2. Laporan pemantauan pengadaan peralatan IT Pendukung Kegiatan Forensik Digital KP DJP dan Kanwil DJP</p>			
				<p>Q3:</p> <p>1. Koordinasi terkait pendaftaran Asesmen Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Kanwil Sumut I, Jatim I, dan Sulselbatra</p> <p>2. Asesmen Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Kanwil Sumut I, Jatim</p>	<p>Q3:</p> <p>1. Bukti dukung pendaftaran akreditasi</p> <p>2. Laporan pelaksanaan kegiatan asesmen akreditasi 3 kanwil</p>			



				I, dan Sulselbatra				
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Akreditasi Laboratorium Forensik Digital Kanwil Sumut I, Jatim I, dan Sulselbatra 2. Evaluasi Pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Forensik Digital Kanwil 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Forensik Digital Kanwil Sumut I, Jatim I, dan Sulselbatra terakreditasi ISO 17025/2017 2. Laporan evaluasi Pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Forensik Digital Kanwil 			
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	<i>Asset Recovery Management System</i>	<p>Sistem Pemulihan Aset yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> 2. Basis data (<i>Database</i>) 3. Sistem Informasi 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsinyering penyusunan SOP 2. Sinkronisasi dengan sistem PSIAP 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan 2. Draft awal SOP 	Januari - Desember 2024	Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Penyidikan)	Rp1.087.160.000



				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan pembentukan basis data 2. Sinkronisasi dengan sistem PSIAP 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Draft</i> SOP 2. Dokumen kebutuhan elemen data 3. Desain awal basis data (<i>database</i>) 			
				<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Banding 2. Rapat pembahasan pembentukan basis data 3. Pembahasan desain sistem informasi 	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desain basis data (<i>database</i>) 2. Desain awal sistem informasi 			
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsinyering sistem informasi 2. Rapat Pembahasan Akhir 	<p>Q4:</p> <p>Dokumen Usulan pengembangan Sistem Informasi</p>			

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T.	NAMA	Sri Mulyani Indrawati	
NIP	196903261993101001	NIP	-	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/ GOL RUANG	-	
JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, akuntabel, dan berkelanjutan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Pemangku Kepentingan
		Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	Pemangku Kepentingan
		Indeks integritas organisasi	100	Pemangku Kepentingan
2.	Kebijakan penerimaan negara yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	100%	Penerima Layanan



4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
5.	Penyusunan regulasi yang berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas peraturan	7,6 (Skala 10)	Proses Bisnis
		Nilai kinerja regulasi prioritas	85%	Proses Bisnis
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Proses Bisnis
		Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	83,75%	Proses Bisnis
10.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase data yang valid	90%	Proses Bisnis
11.	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%	Proses Bisnis
12.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal atau Anggaran



		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	94%	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Pengelolaan TIK yang adaptif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

-



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 4222 pegawai
2. *Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
3	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
5	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	41,50%	65%	65%	82,50%	82,50%	100%	100%
6	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
7	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,60 (skala 10)	7,60 (skala 10)



8	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40%	40%	60%	60%	85%	85%
9	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
11	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
12	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
13	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	66,25%	71,25%	71,25%	76,25%	76,25%	83,75%	83,75%
14	Persentase data yang valid	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
15	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
16	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
17	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
18	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
19	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10



21	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
23	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo
196903261993101001

30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

